



# DOKUMEN (LKjIP)

## TAHUN 2023

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
(DPUPR-PKP) Tahun 2024  
KOTA PROBOLINGGO**

**Jl. Hayam Wuruk No. 69, Kota Probolinggo**

**Telp. (0335) 421 481**

**[dpupr@probolinggokota.go.id](mailto:dpupr@probolinggokota.go.id)**

**[dpuprpkp.kotaprobolinggo@gmail.com](mailto:dpuprpkp.kotaprobolinggo@gmail.com)**

# KATA PENGANTAR

Dalam era globalisasi dewasa ini terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut di atas diperlukan suatu sistem dan mekanisme kinerja aparatur pemerintah yaitu dalam perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global.

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo memaparkan visi, misi, lingkungan strategis, tujuan dan sasaran organisasi, serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mencakup program selama 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan riil.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap agar LKJIP ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo.

Probolinggo, Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PROBOLINGGO

**SETIORINI SAYEKTI, S.K.M, M.Si**  
NIP. 19740527 199703 2 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Dalam upaya merealisasikan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented governance). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada pelayanan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Laporan Kinerja tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang disusun secara sistematis dan melembaga sebagai hasil capaian kinerja kegiatan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki, pengetahuan antisipatif, manajemen secara sistematis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel, serta mampu mengukur hasil kerjanya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis, sehingga dapat dicapai sasaran sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimulai dari perencanaan strategis, yang meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam Penetapan Kinerja.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2023 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi capaian penetapan kinerja tahun 2023 dan dilakukan terhadap indikator hasil (outcome).

Hasil realisasi pelaksanaan tugas atau Pencapaian Kinerja tahun anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alat ukur lima Indikator Kinerja Utama yaitu Indikator 1 adalah Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Konstruksi sebesar 89%, Indikator 2 adalah Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap sebesar 81%, Indikator 3 adalah Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW sebesar 81%, Indikator 4 adalah Persentase Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik sebesar 84%, serta Indikator 5 adalah Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh sebesar 81%.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 disusun dan merupakan gambaran Kinerja yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.1.1 Pembentukan Organisasi**

Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Walikota Nomor 96 Perubahan Atas Perwali Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan.

#### **1.1.2 Kedudukan Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo merupakan Unit Kerja dengan Susunan Organisasi terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, membawahi :
  - Subbagian Tata Usaha
  - Subbagian Keuangan
  - Jabatan Fungsional Perencana

Bidang Cipta Karya, membawahi :

Jabatan Fungsional :

- Teknik Penyehatan Lingkungan
- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- Pembina Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi :

- Seksi Pertanahan

Jabatan Fungsional :

- Penata Ruang
- Analis Kebijakan

Bidang Bina Marga, membawahi :

Jabatan Fungsional :

- Teknik Jalan dan Jembatan
- Analis Kebijakan

Bidang Sumber Daya Air, membawahi :

Jabatan Fungsional :

- Teknik Pengairan
- Analis Kebijakan

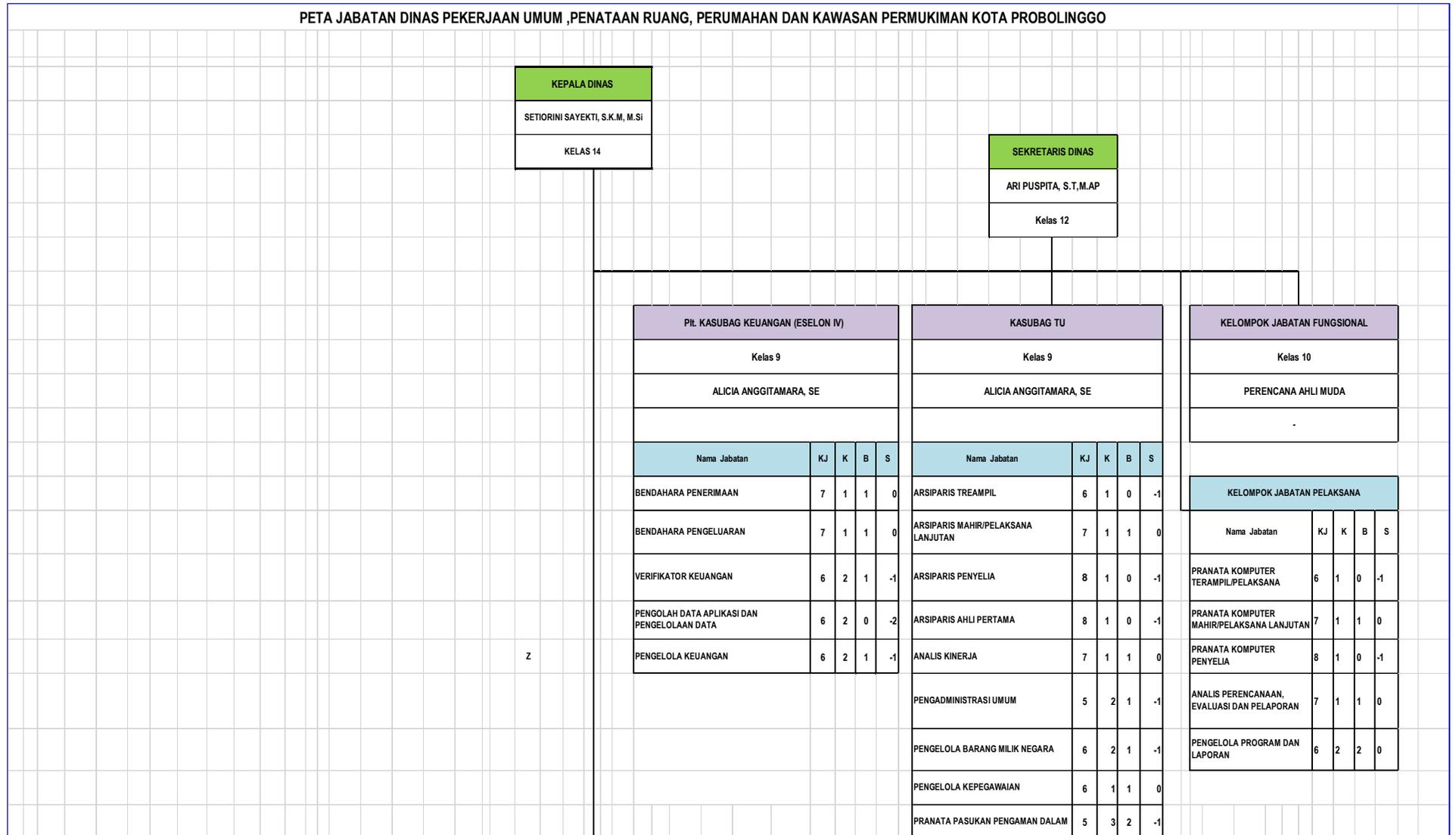
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :

Jabatan Fungsional :

- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- Analis Kebijakan

Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala UPT Rumah Susun

### 1.1. 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo



KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR					KEPALA BIDANG BINA MARGA					PIH.KEPALA BIDANG CIPTA KARYA					KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN					KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																													
ASEP SUPRAPTO LELONO, S.TP , M.M					GIGH ARDIYAWAN PRATAMA, S.T					RAHMAN KURNIADI, S.T, M.T					DWI ANUGERAH PRAWANTI, S.T, M.SI					TAUFIK HIDAYAT, S.P, M.M																													
Kelas 11					Kelas 11					Kelas 11					Kelas 11					Kelas 11																													
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					PLI. KEPALA SEKSI PERTANAHAN					KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL																													
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 10					ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 10					PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA/ KELAS JABATAN 8					Kelas 9					ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 10																													
SIGIT EKO PRIYANTO, S.T					FAHMI SAPUTRA, S.T, M.M					R.M FALAQ ABROR ABSHARI, S.T					HARI SETYONO, S.T, M.T					EDI SUSANTO, S.T , M.M																													
TEKNIK PENGAIRAN TERAMPIL /KELAS JABATAN 6					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA / KELAS JABATAN 8					PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Jabatan Pelaksana</th> <th>KJ</th> <th>K</th> <th>B</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANALIS PERTANAHAN</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>JURU PUNGUT RETRIBUSI</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td>PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>PENGOLAH DATA SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>-1</td> </tr> </tbody> </table>					Nama Jabatan Pelaksana	KJ	K	B	S	ANALIS PERTANAHAN	7	1	1	0	JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	3	0	-3	PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	6	1	0	-1	PENGOLAH DATA SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	6	1	0	-1	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA /KELAS JABATAN 8				
Nama Jabatan Pelaksana	KJ	K	B	S																																													
ANALIS PERTANAHAN	7	1	1	0																																													
JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	3	0	-3																																													
PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	6	1	0	-1																																													
PENGOLAH DATA SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	6	1	0	-1																																													
-					ROSSY MARCIANUS REGGAR, S.T					-					-																																		
TEKNIK PENGAIRAN MAHIR /KELAS JABATAN 7					FRISKA DIAH AYU PUSPITASARI, S.T					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA /KELAS JABATAN 9																																		
-					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 9					-					YUNI ANGGRAENI, S.T																																		
TEKNIK PENGAIRAN PENYELIA /KELAS JABATAN 8					IKA KRISTINA DEWI, S.S.T, M.M					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 9					CHUSNUR HASANAH, S.T																																		
-					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA / KELAS JABATAN 9					SRI INDRİYANI, S.T, M.SI					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN TERAMPIL /KELAS JABATAN 6																																		
TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA /KELAS JABATAN 8					BENY CANDRA ADITAMA, S.T, M.T					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL					-																																		
-					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL / KELAS JABATAN 6					-					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MAHIR /KELAS JABATAN 7																																		
TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA /KELAS JABATAN 9					-					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN					-																																		
HERDIYANTO, S.T , M.M					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MAHIR / KELAS JABATAN 7					-					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MAHIR /KELAS JABATAN 8																																		
SUNARKO, S.T					-					TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYELIA					-																																		
-					TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PENYELIA / KELAS JABATAN 8					-					-																																		
-					-					TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA /KELAS JABATAN 8					-																																		
-					-					RIZKIA SETYA BUDIASTUTI, S.T					-																																		
Nama Jabatan Pelaksana					KJ	K	B	S	-					Nama Jabatan Pelaksana					KJ	K	B	S																											



#### 1.1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo didukung oleh pegawai sebanyak 140 orang. Data mengenai komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1.4.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Jabatan	Jumlah		
	L	P	Total
ASN	50	16	66
Non ASN	61	12	73
PPPK	-	1	1
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>29</b>	<b>140</b>

**Tabel 1.1.4.2**  
**Komposisi ASN Berdasarkan Golongan**

Golongan	Jumlah
	Total
IV	4
III	6
II	57
I	0
<b>Total</b>	<b>67</b>

**Tabel 1.1.4.3**  
**Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan**

Jenjang	Jumlah		
	L	P	Total
SD	0	0	0
SMP	7	0	7
SMA	17	7	24
D1	0	0	0
D2	0	0	0
D3	5	4	9
S1	11	6	17
S2	8	2	10
S3	0	0	0
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>67</b>

## 1.2 Permasalahan Utama yang Dihadapi Oleh Instansi

Isu-isu strategis dalam bidang pekerjaan umum dapat dijumpai dalam beberapa bidang kemasyarakatan yang merupakan wilayah kerja pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Cipta karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan, Kawasan Permukiman, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Adapun isu-isu strategis tersebut dapat dijabarkan, sebagai berikut:

### a. Bidang Bina Marga, yaitu:

Masih banyaknya kebutuhan perbaikan jalan serta saluran drainase perkotaan maupun kebutuhan pembangunan jalan baru di wilayah kota probolinggo terutama wilayah selatan merupakan kebutuhan utama sebagai salah satu upaya penyediaan Pelayanan Minimal kepada masyarakat yang harus diprogramkan setiap tahunnya. Kebutuhan tersebut meliputi Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kota maupun Jalan Penghubung (kolektor) sebagai akses utama penunjang perekonomian Daerah.

### b. Bidang Cipta Karya, yaitu:

Sebagai salah satu kota tujuan investasi maka kebutuhan infrastruktur berupa gedung-gedung pemerintah, Fasilitas Umum dan bangunan lainnya harus disiapkan oleh Daerah agar menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Probolinggo. Disamping itu penyediaan Sarana Air Bersih, Sanitasi Sehat, Pemeliharaan Tempat peribadatan, Sarana Olah Raga, Fasilitas Umum dan lainnya

harus diprogramkan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

**c. Bidang Sumber Daya Air, yaitu:**

Akibat pemanasan global yang terus menerus dan cuaca yang tidak menentu menjadikan beberapa daerah termasuk Kota Probolinggo menjadi daerah rawan bencana. Oleh karenanya antisipasi potensi bencana terutama bencana banjir harus terus menerus diupayakan dan diminimalisir dengan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sungai dan irigasi yang memadai. Sekaligus sebagai upaya penyediaan kecukupan air bagi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Probolinggo.

**d. Bidang Tata Ruang, dan Pertanahan, yaitu:**

Isu Strategis yang dijumpai pada Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yaitu Penyiapan dan penetapan Peraturan Daerah tentang RDTR, Peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta Peningkatan pemasyarakatan IMB dan pengawasan bangunan.

**e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:**

Program penyediaan lingkungan sehat Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menanggulangi kawasan kumuh Kota Probolinggo akan terus diintensifkan dalam tahun 2019 – 2024 dan akan lebih baik jika Kota Probolinggo semua Perumahan dan Kawasan Permukimannya terbebas dari Kawasan Kumuh. Adapun Isu Strategis yang dijumpai pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau serta Optimalisasi pelaksanaan serah terima fasum dalam pengembangan perumahan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2019–2024 yang memuat visi dan misi Kota Probolinggo sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo. Berikut Visi dari Kota Probolinggo adalah :

#### **1. Visi**

Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi RPJMD Kota Probolinggo tahun 2020-2024 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan

pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu Visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Probolinggo yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kota Probolinggo, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut : **“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”** Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik**

Adalah Penekanan **“Bersama Rakyat”** yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan **“Lebih Baik”** dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2020-2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik.

**2. Berkeadilan**

Adalah Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang **“Berkeadilan”** memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.

**3. Sejahtera**

Adalah Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang **“Sejahtera”** dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkau akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.

#### 4. **Transparan**

Adalah Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “**Transparan**” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.

#### 5. **Aman**

Adalah Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “**Aman**” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta.

#### 6. **Berkelanjutan**

Adalah Merupakan Kondisi dimana aspek kelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian utama dan pengendali dalam operasionalisasi Pembangunan, dimana Pelaksanaan **Pembangunan Berkelanjutan Yang Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Kelestarian Kota.**

## 2. **Misi**

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

Misi 3 “**Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan**”;

## 2. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

**“Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur”**

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dalam mewujudkan misinya menetapkan Indikator Tujuan, sebagai berikut :

**” Persentase Ketersediaan Infrastruktur”**

**” Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik”**

## 3. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 3 "***Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur***" maka ditetapkan sasaran :
  - a. Meningkatnya Kualitas Fasilitas Umum;
  - b. Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan;
  - c. Meningkatnya Penataan Ruang Kota sesuai RTRW;
  - d. Meningkatnya Sumber Daya Air;
  - e. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

SASARAN KOTA	INDIKATOR SASARAN KOTA	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatnya Penataan Ruang sesuai RTRW	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	78%	79%	80%	81%	82%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana tata ruang yang Disusun sesuai Ketentuan
													Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Tata Ruang yang difasilitasi melalui TKPRD
											Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase IMB yang terselesaikan Tepat Waktu	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IMB yang Terselesaikan Tepat Waktu
				Meningkatnya Kualitas Fasilitas Umum	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	86%	87%	88%	89%	90%	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	Penyelenggaraan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik

										Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Capaian Jaringan SPAM Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah Dalam Kondisi Baik
										Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Cakupan Layanan Limbah Domestik Akses Air	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik yang Terbangun dan Terpelihara

SASARAN KOTA	INDIKATOR SASARAN KOTA	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	78%	79%	80%	81%	82%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik
				Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	81%	82%	83%	84%	85%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	Pengelolaan SDA dan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik
													Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik

SASARAN KOTA	INDIKATOR SASARAN KOTA	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	73%	75%	78%	81%	85%	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan dalam Kondisi Mantap	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Perumahan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik
													Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota
													Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Fasilitas Rumah Susun dalam Kondisi Baik
													Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Ijin Site Plan yang sesuai Ketentuan

## 2.2 Program dan Kegiatan

Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan pembangunan daerah dan merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan kebijakan umum yang telah disepakati, maka program dan kegiatan yang merupakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2023 sebagai berikut :

### ❖ **Bagian Sekretariat**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### ❖ **Bidang Sumber Daya Air**

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

### ❖ **Bidang Bina Marga**

Program Penyelenggaraan Jalan

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

## ❖ **Bidang Cipta karya**

Program Penataan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung;

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

## ❖ **Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan**

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- Kegiatan Penyelenggaran Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

## ❖ **Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program Pengembangan Permukiman

- Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Program Pengembangan Perumahan

- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

## ❖ UPT Rumah Susun

Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

### Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk tahun 2023 ada 13 Program pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PROGRAM
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp <b>12.913.123.619,00</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 132.226.000,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.450.162.057,00
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 7.500.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.816.463.850,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 5.000.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 655.962.972,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 845.808.740,00

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN PROGRAM</b>
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>Rp 22.733.519.433,00</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 22.733.519.433,00
<b>3.</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>Rp 6.441.625.300,00</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.441.625.300,00
<b>4.</b>	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>	<b>Rp 10.456.940.975,00</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.456.940.975,00
<b>5.</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Rp 53.570.718.966,00</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung	Rp 53.570.718.966,00
<b>6.</b>	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>Rp 658.480.000,00</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 658.480.000,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PROGRAM
<b>7.</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>Rp 1.630.144.000,00</b>
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.714.000,00
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.589.430.000,00
<b>8.</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>Rp 1.729.515.000,00</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.729.515.000,00
<b>9.</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>Rp 1.269.272.000,00</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.269.272.000,00
<b>10.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>Rp 223.864.000,00</b>
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 151.864.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 72.000.000,00
<b>11.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Rp 1.055.350.000,00</b>
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp 906.357.031,00
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 431.250.000,00
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Rp 210.000.000,00

12.	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	Rp	<b>845.350.000,00</b>
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp	845.350.000,00
13.	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	Rp	<b>68.770.500,00</b>
	Kegiatan Pemberian Izin Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	68.770.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>114.088.930.824,00</b>

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo selama kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo mulai Tahun 2020 s/d 2024.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah tersebut, maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2023, Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

#### **PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023**

NO	SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Fasilitas Umum	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	89%
2.	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	81%
3.	Meningkatnya Penataan Ruang Kota sesuai RTRW	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW	81%
4.	Meningkatnya Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	84%
5.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	81%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Tahun 2020 s/d 2024, Visi, Misi dan Tujuan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### 3.1.1 Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas Infrastruktur

###### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2023

Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Target Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap yaitu 81%	Realisasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap pada tahun 2022 adalah sebesar 96,58 %	119,23 %
2.	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	Target Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi yaitu 89%	Realisasi Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi yaitu 87 %	97,75 %
3.	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW	Target Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW yaitu 81%	Realisasi Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW yaitu 81 %	100 %
4.	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	Target Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik yaitu 84%	Realisasi Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik 84 %	100 %

5.	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	Target Penurunan Luasan Permukiman Kumuh 61 %	Realisasi Penurunan Luasan Permukiman Kumuh 49,98 %	61,70 %
----	--	---	---	---------

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 sampai dengan akhir periode Renstra

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra (Th.2024)	Realisasi	Tingkat kemajuan
1	2	3	4
Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	82 %	96,58 %	Kemajuan Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap 117,78 %
Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	90 %	87 %	Kemajuan Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi 96,66 %
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW	85 %	81 %	Kemajuan Persentase Ruang yang Sesuai RTRW 95,29 %
Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	85 %	84 %	Kemajuan Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik 98,82 %
Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	85 %	49,98 %	Kemajuan Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh 58,80 %

c. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		
					PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	81 %	96,58 %	119,23 %	22.733.519.433,00	19.821.401.185,00	87,19 %
2	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	89 %	87 %	97,75 %	56.569.505.966,00	51.273.976.393,00	90,63 %
3	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW	81 %	81 %	100 %	882.344.000,00	832.885.453,00	94,39 %
4	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	84 %	84 %	100 %	1.630.144.000,00	1.606.116.715,00	98,52 %
5	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	81 %	49,98 %	61,70 %	2.392.957.031,00	2.041.783.768,00	85,32 %

d. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.4  
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	1	3	4	5
1.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	119,23 %	87,19 %	Efisiensi = 119,23-87,19 % = 32,04 % ( <b>EFISIEN</b> )
2.	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	97,75 %	90,63 %	Efisiensi = 97,75-90,63 % = 7,12 % ( <b>EFISIEN</b> )
3.	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW	100 %	94,39 %	Efisiensi = 100-94,39 % = 5,61 % ( <b>EFISIEN</b> )
4.	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	100 %	98,52 %	Efisiensi = 100-98,52 % = 1,48 % ( <b>EFISIEN</b> )
5.	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	61,70 %	85,32 %	Efisiensi = 61,7-85,32 % = - 23,6 % ( <b>TIDAK EFISIEN</b> )

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5  
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI YG DILAKUKAN
	2		3	4	5
1.	Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	81 %	96,58 %	Keberhasilan peningkatan kinerja jalan kota dalam kondisi mantap dari target yang ditentukan disebabkan karena kecepatan dan ketanggapan dalam pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan jalan kota	-
2.	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	89 %	87 %	Keberhasilan peningkatan kinerja fasilitas umum yang sesuai standar konstruksi disebabkan pembangunan dan rehabilitasi gedung, bangunan dan fasilitas umum yang dilaksanakan sesuai mutu dan kelayakan bangunan fasilitas umum	-

3.	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW	81 %	81 %	Pencapaian persentase pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW yaitu dokumen permohonan KKPR/KRK yang diterbitkan digunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	
4.	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	84 %	84 %	Pencapaian persentase sumber daya air dalam kondisi baik sesuai target yang ditentukan yaitu kondisi irigasi pengairan yang terpelihara dengan baik	
5.	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	81 %	49,98 %	Pencapaian penurunan luasan permukiman kumuh s/d tahun 2023 sebesar 26,56 Ha dari luasan kumuh awal sebesar 53,14 Ha .	

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo tahun 2023 sebesar Rp 114.088.930.824,00 (Seratus empat belas milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dengan besaran anggaran Rp 46.825.336.354,00 (Empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)
2. Belanja Modal terdiri dari belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan dengan besar anggaran sebesar Rp. 67.263.594.470,00 (Enam puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

**Tabel 3.2.1**  
**Realisasi Anggaran Belanja Dinas PUPRPKP Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	Rp. 46.825.336.354,00	Rp. 43.303.073.778,00	89,44
2.	Belanja Modal	Rp. 67.263.594.470,00	Rp. 57.275.820.650,00	79,60

**Tabel 3.2.2**  
**Realisasi Anggaran Belanja Dinas PUPR/ PKP Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023**

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>111.627.203.293,00</b>	<b>98.982.057.714,00</b>	<b>88,67</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>12.913.123.619,00</b>	<b>12.067.900.438,00</b>	<b>93,45</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>132.226.000,00</b>	<b>90.520.240,00</b>	<b>68,46</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.476.000,00	85.770.240,00	67,82
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.750.000,00	4.750.000,00	82,61
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.450.162.057,00</b>	<b>9.063.669.046,00</b>	<b>95,91</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.721.246.057,00	8.391.211.596,00	96,22
Pelaksanaan PenataUsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	728.916.000,00	672.457.450,00	92,25
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>74,00</b>
PenataUsahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00	5.550.000,00	74,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000,00</b>	-	<b>0</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	-	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.816.463.850,00</b>	<b>1.529.457.676,00</b>	<b>84,20</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	88.674.750,00	42.765.500,00	48,23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.280.000,00	149.185.000,00	96,07
Penyediaan Peralatan RumahTangga	21.793.900,00	19.752.500,00	90,63
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	279.545.800,00	267.646.122,00	95,74
Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	166.061.500,00	144.792.850,00	87,19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,00	1.650.000,00	42,31
Penyediaan Bahan/Material	115.147.900,00	114.913.100,00	99,80
Fasilitasi Kunjungan Tamu	174.000.000,00	155.945.000,00	89,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	619.325.000,00	460.491.982,00	74,35
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	81.700.000,00	75.710.000,00	92,67
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintan Berbasis Elektronik pada SKPD	111.035.000,00	96.605.622,00	87,00

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>655.962.972,00</b>	<b>585.584.313,00</b>	<b>89,27</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	127.006.000,00	104.146.320,00	<b>82,00</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	390.956.972,00	358.630.843,00	<b>91,73</b>
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.000.000,00	22.927.150,00	<b>60,33</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000,00	99.880.000,00	<b>99,88</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>845.808.740,00</b>	<b>793.119.163,00</b>	<b>93,77</b>
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.453.300,00	14.269.500,00	<b>60,84</b>
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.736.940,00	286.225.300,00	<b>91,23</b>
Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	4.900.000,00	<b>98,00</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.121.300,00	232.034.700,00	<b>99,53</b>
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.497.200,00	155.898.663,00	<b>94,20</b>
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000,00	99.791.000,00	<b>95,04</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>1.630.144.000,00</b>	<b>1.606.116.715,00</b>	<b>98,53</b>
<b>Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.714.000,00</b>	<b>36.384.080,00</b>	<b>89,37</b>
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	40.714.000,00	36.384.080,00	<b>89,37</b>
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.589.430.000,00</b>	<b>1.569.732.635,00</b>	<b>98,76</b>
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	628.864.000,00	617.115.490,00	<b>98,13</b>
Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	893.776.000,00	889.727.145,00	<b>99,55</b>
Pengelolaan dan Pengawasan A Air Irigasi	66.790.000,00	62.890.000,00	<b>94,16</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>1.729.515.000,00</b>	<b>1.722.831.760,00</b>	<b>99,61</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.729.515.000,00</b>	<b>1.722.831.760,00</b>	<b>99,61</b>
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	358.000.000,00	357.238.100,00	<b>99,79</b>
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.227.743.000,00	1.222.643.000,00	<b>99,58</b>
Operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	143.772.000,00	142.950.660,00	<b>99,43</b>

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>1.269.272.000,00</b>	<b>1.240.015.160,00</b>	<b>97,69</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.269.272.000,00</b>	<b>1.240.015.160,00</b>	<b>97,69</b>
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik TerpUsahat Skala Permukiman	210.272.000,00	183.996.160,00	<b>87,50</b>
Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	309.000.000,00	306.219.000,00	<b>99,10</b>
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	750.000.000,00	749.800.000,00	<b>99,97</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>6.441.625.300,00</b>	<b>5.686.414.121,00</b>	<b>88,28</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.441.625.300,00</b>	<b>5.686.414.121,00</b>	<b>88,28</b>
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	5.310.050.000,00	4.581.148.573,00	<b>86,27</b>
Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	1.131.575.300,00	1.105.265.548,00	<b>97,67</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>10.456.940.975,00</b>	<b>7.693.363.409,00</b>	<b>73,57</b>
<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.456.940.975,00</b>	<b>7.693.363.409,00</b>	<b>73,57</b>
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.020.000.000,00	918.950.057,00	<b>90,09</b>
Pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.436.940.975,00	6.774.413.352,00	<b>71,79</b>
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>53.570.718.966,00</b>	<b>48.311.129.473,00</b>	<b>90,18</b>
<b>Penyelenggaraan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung</b>	<b>53.570.718.966,00</b>	<b>48.311.129.473,00</b>	<b>90,18</b>
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	84.999.800,00	78.250.000,00	<b>92,06</b>
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	49.321.777.166,00	44.252.756.486,00	<b>89,72</b>
Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.163.942.000,00	3.980.122.987,00	<b>95,59</b>
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>658.480.000,00</b>	<b>654.211.373,00</b>	<b>99,35</b>
<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>658.480.000,00</b>	<b>654.211.373,00</b>	<b>99,35</b>
Penataan bangunan dan Lingkungan	658.480.000,00	654.211.373,00	<b>99,35</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>22.733.519.433,00</b>	<b>19.821.401.185,00</b>	<b>87,19</b>
<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>22.733.519.433,00</b>	<b>19.821.401.185,00</b>	<b>87,19</b>
Pembangunan Jalan	10.961.244.000,00	8.746.703.693,00	<b>79,80</b>
Rehabilitasi Jalan	9.215.190.000,00	8.630.864.945,00	<b>93,66</b>
Pemeliharaan Berkala Jalan	2.257.085.433,00	2.245.947.220,00	<b>99,51</b>
Pembangunan Jembatan	200.000.000,00	98.361.540,00	<b>49,18</b>
Rehabilitasi Jembatan	100.000.000,00	99.523.787,00	<b>99,52</b>

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>223.864.000,00</b>	<b>178.674.080,00</b>	<b>79,81</b>
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>151.864.000,00</b>	<b>147.374.080,00</b>	<b>97,04</b>
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	151.864.000,00	147.374.080,00	97,04
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>43,47</b>
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	72.000.000,00	31.300.000,00	43,47
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>2.392.957.031,00</b>	<b>1.533.314.054,00</b>	<b>64,08</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1.547.607.031,00</b>	<b>1.024.844.340,00</b>	<b>66,22</b>
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1,33</b>
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	210.000.000,00	2.800.000,00	1,33
<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>906.357.031,00</b>	<b>898.559.340,00</b>	<b>99,14</b>
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun )	906.357.031,00	898.559.340,00	99,14
<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan PERUMAHAN</b>	<b>431.250.000,00</b>	<b>123.485.000,00</b>	<b>28,63</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	431.250.000,00	123.485.000,00	28,63
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>845.350.000,00</b>	<b>508.469.714,00</b>	<b>60,15</b>
<b>URUSAN Penyelenggaraan PSU PERUMAHAN</b>	<b>845.350.000,00</b>	<b>508.469.714,00</b>	<b>60,15</b>
Penyediaan Prasarana, Sarana , dan Utilitas Umum di PERUMAHAN untuk Menunjang Fungsi Hunian	845.350.000,00	508.469.714,00	60,15
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>68.770.500,00</b>	<b>63.522.660,00</b>	<b>92,37</b>
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>68.770.500,00</b>	<b>63.522.660,00</b>	<b>92,37</b>
<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>68.770.500,00</b>	<b>63.522.660,00</b>	<b>92,37</b>
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.770.500,00	63.522.660,00	92,37
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>114.088.930.824,00</b>	<b>100.578.894.428,00</b>	<b>88,16%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2023 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LKjIP melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai rencana kinerja (*performance plan*) dan Arah Kebijakan Umum Pelaksanaan APBD Tahun 2023 sehingga dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan perencanaan tahun ke depannya.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu LKjIP ini diharapkan dapat menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan profesional sehingga dari nilai capaian kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan manfaat yang sangat berguna sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo.

LKjIP ini mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2023 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan dapat lebih memahami tentang rencana strategis selama 5 tahun ke depan serta pengembangannya di masa yang akan datang. Mendorong tindakan perbaikan terus-menerus dalam pencapaian kinerja terutama dalam pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien.